

# DINAMIKA POLITIK PILKADES DI ERA OTONOMI DAERAH<sup>1</sup>

*Studi tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa dengan Para Pemilih Pilkades*

Alamsyah, SIP, M.Si<sup>2</sup>

## **Abstrak**

*Tulisan ini mereview model-model teoritik yang telah dikembangkan beberapa ilmuwan politik untuk memahami interaksi kandidat dengan para pemilih. Berdasarkan studi kritis atas model-model ini, makalah ini menawarkan kerangka pikir alternatif untuk memahami interaksi calon kepala desa dengan para pemilih. Sebagian variabel yang terkandung dalam kerangka pikir ini digunakan untuk menganalisis Pilkades Kembangsri 2010. Dalam konteks Pilkades Kembangsri 2010, hubungan antara kandidat dan para pemilih pilkades ini dipengaruhi image politik kandidat, proses evaluasi retrospektif di tingkat pemilih, dan media komunikasi dan informasi yang digunakan selama penyelenggaraan pilkades. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka pikir yang ditawarkan cukup relevan untuk memahami interaksi calon kepala desa dengan para pemilih dalam pilkades. Tetapi, kerangka pikir ini perlu diuji lebih jauh dengan melibatkan sampel yang lebih besar.*

**Katakunci:** *pilkades, perilaku pemilih, perilaku kandidat*

## **Abstract**

*This article attempt to review developed theoretical model on candidate and voter relations. Based on critical studies towards these models, this article developing another framework to understanding candidate and voter relations in the village general elections. Parts of this framework will be using to analyze the village of general election in Kembangsri village. In the context of Kembangsri's village general elections, candidate and voter relation was influenced by candidate political image, retrospective evaluation process, and information and communication media. These finding approved that the alternative framework is relevant to understanding candidate and voters relations in village general election. But, the alternative framework must be investigation once more with a big sample.*

**Keywords:** *village general elections, voter behavior, candidate behavior*

---

<sup>1</sup> Dimuat dalam Jurnal TAMANPRAJA Vol. 1 Edisi 1, Juni 2011 (ISSN: 2087-9598)

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya

## Prolog

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan sistem politik yang signifikan. Judul besar perubahan itu adalah demokratisasi, baik dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan ekonomi.<sup>3</sup> Dalam konteks makalah ini, diantara komponen yang mengalami perubahan itu adalah sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga komponen ini memiliki pengaruh serius terhadap kehidupan politik pada level desa.

Dalam hal sistem kepartaian, Indonesia menerapkan sistem multi-partai diiringi dengan pencabutan politik massa mengambang (*floating mass*). Konsekuensinya, penduduk desa bebas untuk menjadi pengurus, anggota, dan/atau simpatisan partai politik manapun. Terkait dengan sistem pemilihan umum, reformasi menghendaki para pejabat politik, terutama eksekutif pada level pemerintahan pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dipilih langsung oleh rakyat. Konsekuensinya, frekuensi penduduk desa mengikuti pemilihan umum semakin tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun, paling tidak, mereka akan mengikuti empat pemilu yakni: pemilu presiden/wakil presiden, pemilu anggota DPR/DPD/DPRD, pemilu gubernur/wakil gubernur, pemilu bupati/wakil bupati dan/atau walikota/wakil walikota, serta pemilihan kepala desa (pilkades).

Sementara itu, tatkala reformasi merubah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi yang diaplikasikan sejak 1999, jarak proses pembuatan keputusan politik semakin pendek dan pemerintah daerah semakin memiliki ruang manuver lebih besar untuk mempercepat pembangunan daerah. Di depan mata, terlihat jelas bagaimana desentralisasi diiringi dengan pemekaran desa/kelurahan, implementasi Dana Alokasi Desa (DAD), dan semakin strategisnya posisi kepala desa dan penduduk desa karena imbas pemilihan kepala daerah secara langsung.

Makalah ini tidak berpretensi untuk menganalisis demokratisasi di era desentralisasi secara utuh. Sebaliknya, ia diarahkan menganalisis relasi calon kepala desa dan para pemilih di era desentralisasi. Isu ini menarik dikaji sebab diduga desentralisasi yang meningkatkan frekuensi pengalaman para pemilih dalam pemilihan umum akan menciptakan para pemilih yang semakin rasional. Untuk mengkaji persoalan ini, penulis akan memaparkan terlebih dahulu makna dan sistem pemilihan umum. Dilanjutkan dengan narasi tentang teori-teori politik tentang perilaku kandidat dan perilaku pemilih. Teori-teori ini, tentu saja, banyak diimpor dari luar. Karena barang impor, beragam kelemahan teori-teori ini perlu dibongkar jika ingin digunakan sebagai kacamata untuk memahami relasi politik calon kepala desa (*the candidate*) dengan para pemilih kepala desa (*the voter*). Tetapi, keberadaan teori-teori ini tetap penting untuk membangun kerangka pikir dalam rangka menjelaskan *nexus candidate-voter* dalam konteks pilkades.

---

<sup>3</sup> Proses demokratisasi pasca Rezim Orde Baru terdokumentasi dengan bagus dalam karya Bunte dan Ufen (2009), Robison dan Hadiz (2004), O'Rourke (2002), Erb, Sulistiyanto, dan Faucher (2005), Al, Martinez-Vazquez, dan Indrawati (2004)

## **Makna dan sistem pemilihan umum**

Pemilihan umum (*general elections*) dapat didefinisikan sebagai proses politik dimana warga negara yang sudah memiliki hak pilih menyalurkan suaranya untuk memilih orang-orang tertentu yang akan duduk mewakili mereka di lembaga perwakilan, baik itu lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Orang-orang yang terpilih melalui pemilihan umum inilah yang menjalankan roda pemerintahan perwakilan. Pemilu, hak pilih dan/atau hak memilih warga negara, dan lembaga perwakilan merupakan sebagian dari ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi.

Pemilihan umum merupakan fenomena politik yang bisa dijelaskan dari dimensi sistem, kontestasi, proses, nilai dan norma, dan metode tertentu. Pemilihan umum bersifat universal karena diterapkan di semua negara yang menggunakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. Tetapi, muatan dimensi sistem, kontestasi, proses, metode, prosedur, nilai dan norma penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri bisa berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Dilihat dari sistemnya, dikenal dua sistem pemilihan umum, yakni: *single-member electoral system* dan *proportional representation electoral system*. Dalam pola *single-member electoral system*, wilayah negara dibagi ke dalam banyak daerah pemilihan. Hanya satu wakil dapat dari setiap daerah pemilihan. Sedangkan dalam pola *proportional representation electoral system*, wilayah negara juga dibagi ke dalam banyak daerah pemilihan. Tetapi, setiap daerah pemilihan bisa diwakili beberapa orang atau lebih tergantung kepada jumlah penduduk yang ada di daerah pemilihan tersebut (Rodee, *et. al.*, 1983: 267-268).

Di lihat dari dimensi kontestasinya, pemilihan umum bisa diikuti individu dan/atau partai politik. Meskipun individu diperkenankan menjadi kontestan pemilihan umum, tetapi kebanyakan negara-negara demokrasi mensyaratkan keberadaan partai politik sebagai kendaraan warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Per definisi, partai politik dapat didefinisikan sebagai organisasi politik yang didirikan oleh sekumpulan warga negara untuk mengagregasikan, mensosialisasikan, mengkomunikasikan, dan mengartikulasikan kepentingan politik anggotanya.

Di lihat dari prosesnya, pemilihan umum terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Di Indonesia, sebagai contoh, pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni: pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan proses pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih (Pasal 4 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008).

Di lihat nilai dan normanya, pemilihan umum diselenggarakan dengan berpedoman kepada seperangkat nilai dan normat tertentu. Sebagai contoh, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah wajib dilaksanakan secara efektif dan efisien

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keberadaan nilai dan norma penting untuk memelihara proses pemilihan umum yang berkualitas.

Di lihat dari metodenya, pemilihan umum memiliki banyak sub-metode. Misalnya, bagaimana metode mentransformasikan suara menjadi kursi, bagaimana metode pencoblosan suara (dicoblos, dicontreng, dipilih melalui komputer, atau menggunakan *e-voting*), bagaimana metode kampanyenya, bagaimana metode pencalonan kontestan pemilu, dan lain sebagainya.

### **Perilaku pemilih dan kandidat**

Pemilih dan kandidat merupakan subyek dalam pemilihan umum. Keduanya merepresentasikan warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan/atau memilih. Perbedaan keduanya terletak pada pelaksanaan hak konstitusional ini. Jika para pemilih merealisasikan hak memilihnya, maka kandidat (baik yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan dan/atau melalui jalur partai politik) merealisasikan hak untuk dipilih.

Dalam konteks makalah ini, perbedaan antara pemilih dan kandidat bisa dijelaskan melalui aspek perilakunya. Yang dimaksud dengan aspek perilaku dari sisi pemilih adalah respon *fisik*, *psikis*, dan *sosial* yang diberikan para pemilih akibat kehadiran stimulus dari dalam dan luar dirinya yang mempengaruhi pilihan akhirnya dalam proses pemilihan umum. Sedangkan dari sisi kandidat, aspek perilaku merujuk kepada serangkaian respon *fisik*, *psikis*, dan *sosial* yang diberikan kandidat untuk mempengaruhi keputusan akhir para pemilih dalam pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum, apapun sistem dan metodenya, keputusan akhir para pemilih berada dua spektrum pilihan, yakni: memilih dan/atau tidak memilih. Pertanyaan yang selalu memicu adrenalin intelektual ilmuwan politik terhadap fenomena ini adalah mengapa para pemilih memilih dan/atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Penulis akan menguraikan beberapa teori yang telah dikembangkan ilmuwan politik untuk menjelaskan persoalan perilaku pemilih ini.

Menurut Adams, Merrill III, dan Grofman (2005), ada tiga sudut pandang yang bisa digunakan ilmuwan politik untuk memahami perilaku pemilih, yakni: model *spatial* (para pemilih termotivasi akibat serangkaian kebijakan yang ditawarkan, sedang, dan/atau dijalankan kandidat), model *behavioral*, (keputusan para pemilih tidak hanya dipengaruhi faktor kebijakan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor identifikasi partai politik, karakteristik sosio-demografis, persepsi pemilih terhadap kondisi ekonomi, evaluasi retrospektif pemilih terhadap kinerja *incumbent*) dan model *party competition* (perilaku pemilih dipengaruhi faktor loyalitas kepada partai politik, kemampuan pemilih menganalisis program-program yang ditawarkan kandidat, dan persepsi bahwa tidak ada kontestan pemilihan umum yang atraktif.

Argumentasi Adams, Merrill III, dan Grofman (2005) memiliki kelemahan serius jika ingin digunakan untuk memahami relasi politik calon kepala desa dengan para pemilih. Model *party competition* tidak bisa diterapkan karena pencalonan seseorang dalam pilkades tidak melalui partai politik. Hanya model *spatial* dan

*model behavioral* yang bisa diterapkan meski dengan sangat hati-hati. Sebab, dalam kasus model behavioral, tidak seluruh variabel dalam model ini bisa diaplikasikan karena kurang relevan. Sebagai contoh, model ini menganggap persepsi pemilih terhadap kondisi ekonomi merupakan salah satu determinan para pemilih. Dalam konteks pilkades, variabel ini kurang relevan karena faktanya kondisi perekonomian desa lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor eksternal (*misalnya*, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota).

Sementara itu, Lau & Relawsk (2006: 3-46) menunjukkan lima model yang bisa digunakan untuk memahami perilaku pemilih dalam pemilihan umum, yakni: model *rational choice*, model *confirmatory decision making*, model *fast and frugal decision making*, model *semiautomatic intuitive decision making*, dan model *process-oriented decision making* yang mereka usulkan. Perbedaan antar model-model ini disarikan dalam Tabel 1.

Argumentasi Lau & Relawsk (2006: 3-46) juga memiliki kelemahan serius. Diantara model-model yang ditawarkan, hanya model *rational*, model *fast and frugal decision making*, dan model *semiautomatic intuitive decision making* yang menurut hemat penulis relevan untuk digunakan sebagai kaca mata dalam rangka memahami relasi politik calon kepala desa dengan para pemilih pilkades. Tetapi model-model ini tidak mempertimbangkan konteks sosio-budaya masyarakat desa yang cenderung bersifat emosional tatkala memilih kandidat (baik parpol maupun individu). Model *confirmatory decision making* kurang relevan digunakan karena pencalonan pilkades tidak melalui partai politik dan keberadaan media massa sebagai instrumen komunikasi politik pada level desa sangat jarang.

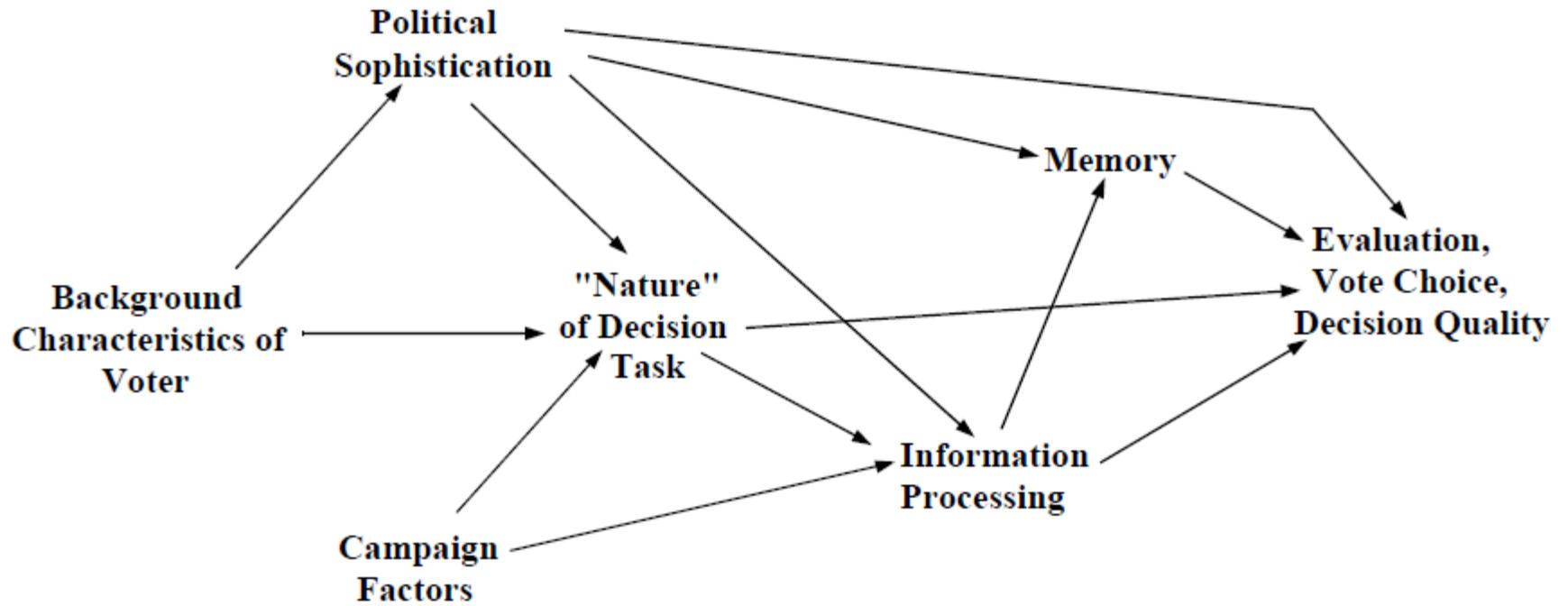
Sedangkan model *process-oriented decision making* yang digunakan Lau & Relawsk (2006) memahami perilaku pemilih divisualisasikan Gambar 1. Meskipun karakteristik pemilih (*misalnya*, pilihan ideologi, status ekonomi, pengalaman politik) tetap diperhitungkan, tetapi model ini memberikan perhatian lebih kepada bagaimana pemilih memperoleh, memproses, dan mengevaluasi informasi yang diterima untuk menentukan keputusan akhir yang akan diambil dalam pemilihan umum (Lau & Relawsk, 2006: 2). Kelebihan model ini terletak pada variabel *information processing*. Model ini bisa digunakan untuk memahami relasi politik calon kepala desa dengan para pemilih pilkades meskipun kemungkinan hasilnya kurang maksimal. Sebab, saat ini populasi penduduk di pedesaan mayoritas berpendidikan sekolah dasar. Konsekuensinya, kapasitas mereka untuk mengolah informasi juga terbatas.

Tabel 1  
Perbedaan model perilaku pemilih

	<b>Model 1</b> <b>Rational Choice:</b> <i>Dispassionate Decision Making</i>	<b>Model 2</b> <b>Early Socialization and</b> <b>Cognitive Consistency:</b> <i>Confirmatory Decision Making</i>	<b>Model 3</b> <i>Fast and Frugal</i> <i>Decision Making</i>	<b>Model 4</b> <b>Bounded Rationality and</b> <b>Intuitive Decision Making</b>
<i>Assumptions about Information Search</i>	Decision makers should actively seek out as much information as possible, about every available alternative [until the cost of additional information exceeds its expected benefit].	Information gathering is basically passive, except party identification should be sought early. Most exposure to relevant information comes from the media and is largely inadvertent. Perception of media messages is often biased in favor of early-learned predispositions, and to the extent information search is purposeful, it too is biased toward those early-learned predispositions.	Decision makers should actively seek out only a very few attributes of judgment which they really care about or which they have found to be most diagnostic, and ignore everything else.	People actively seek out only enough information to allow them to reach a decision (although depth of search is conditioned by the perceived importance of the decision). Cognitive shortcuts and various decision heuristics are heavily (and almost automatically) utilized.
<i>Method of Decision Making</i>	Explicit, conscious, cognitively difficult memory-based consideration of the positive and negative consequences associated with each alternative	Memory-based evaluations of what is known (long-term) and has recently been learned (short-term) about the different alternatives	Explicit memory-based consideration of the one or two positive and negative consequences associated with each alternative	Satisficing or related methods which attempt to make choice relatively easy by restricting information search
<i>Motivations for Choice</i>	Self-Interest	Cognitive Consistency	Efficiency	Making the best possible decision with the least amount of effort; Avoiding value tradeoffs
<i>Electoral Inputs to Decision</i>	Mainly retrospective (e.g., job performance) and prospective (e.g., issue stands) judgments about candidates.	Primarily party identification, but also issue stands, economic evaluations, perceptions of the candidates, and evaluations of the incumbent's job performance.	Candidates' "stands" on the few attributes a voter considers (but certainly not limited to policy stands)	Cognitive shortcuts (stereotypes, schemas, etc.) and other political heuristics

Sumber: Lau & Redlawsk (2006: 8)

Gambar 1  
Variabel-variabel dalam model *process-oriented decision making*

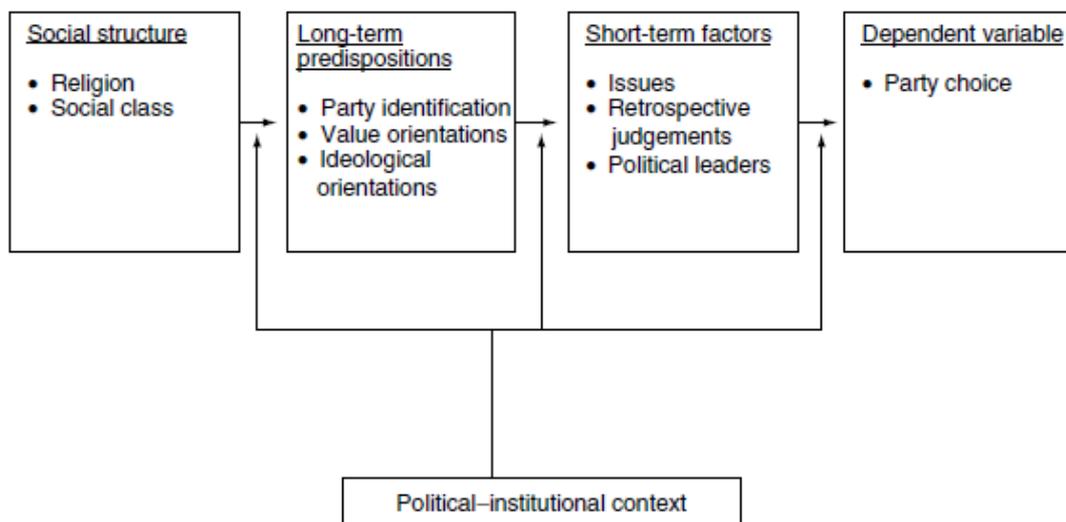


Sumber: Lau & Redlawsk (2006: 22)

Meskipun agak sedikit berbeda karena ditujukan untuk memahami perilaku pemilih dalam memilih partai politik di Eropa, *framework* yang digunakan Thomassen (2005) bisa digunakan sebagai pemandu untuk menjelaskan mengapa para pemilih memutuskan memilih dan/atau tidak memilih kontestan pemilu tertentu. Kerangka pikir yang dikembangkan Thomassen (2005) ini menekankan arti penting variabel agama, kelas sosial, identifikasi partai, orientasi nilai dan ideologi, isu-isu politik, pertimbangan retrospektif, pemimpin politik, dan konteks kelembagaan politik.

Model ini juga memiliki kelemahan serius. Variabel agama, identifikasi partai, orientasi nilai dan ideologi, konteks kelembagaan politik jelas kurang relevan untuk digunakan dalam konteks pilkades. Sebab, mayoritas desa di Indonesia bersifat homogen sehingga variabel agama menjadi kurang relevan. Identifikasi partai, orientasi nilai dan ideologi dan kelembagaan politik juga kurang relevan karena pilkades tidak melibatkan partai politik. Meskipun partai politik hidup subur pada level desa. Yang relevan dari model ini adalah kelas sosial, isu-isu politik, pertimbangan retrospektif, dan pemimpin politik.

Gambar 2  
Determinan para pemilih di Eropa dalam memilih partai politik



Sumber: Thomassen (2005: 8)

Model-model teoritik yang telah diuraikan di atas menunjukkan bagaimana fenomena perilaku politik para pemilih sebetulnya sangat bersifat dinamis. Ia berubah dari waktu ke waktu. Artinya, pemahaman kita terhadap perilaku politik pemilih sebetulnya hanya berlaku untuk kurun waktu tertentu saja. Dalam kerangka berpikir seperti inilah hasil temuan Liddle dan Mujani (2007: 832-857) yang

menyatakan bahwa perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif 1999 dan Pemilu Presiden 2004 sangat dipengaruhi faktor kepemimpinan, identitas partai politik, orientasi keagamaan, kondisi ekonomi<sup>4</sup>, politik, sosiologis, dan demografis, harus dipahami.

Temuan Liddle dan Mujani (2007: 832-857) juga perlu disikapi dengan hati-hati. Seperti halnya dengan model Thomassen (2005), identitas partai politik dan orientasi keagamaan jelas kurang relevan untuk digunakan dalam memahami perilaku pemilihan dan perilaku kandidat dalam pilkades. Alasannya sederhana: karena masyarakat desa bersifat homogen dalam konteks agama dan pilkades tidak melibatkan partai politik. Variabel faktor kepemimpinan dan kondisi ekonomi, politik, sosiologis, dan demografis desa cukup relevan untuk digunakan.

Selanjutnya, bagaimana dengan kontestan (*the candidates*) pemilihan umum? Ada dua arus besar pemikiran yang mempengaruhi ilmuwan politik untuk memahami perilaku kandidat dalam pemilu, yakni: *the Michigan school* yang dipengaruhi teori-teori psikologi sosial dan *the Rochester school* yang dipengaruhi teori-teori ekonomi mikro. Dengan mensintesis dua aliran pemikiran ini, Simon (2004) mengusulkan kerangka berpikir untuk memahami perilaku kandidat dalam pemilihan umum (lihat, Gambar 3). Kerangka berpikir ini dianggap mensintesis *the Michigan school* dan *the Rochester school* karena ia menggabungkan dua asumsi yang digunakan di setiap model. Dari *the Michigan school*, Simon (2004) meminjam asumsi mereka tentang perilaku pemilih yang dianggap deterministik karena dipengaruhi faktor-faktor tertentu. Sedangkan dari *the Rochester school*, Simon (2004) meminjam asumsi mereka tentang kontestan (*the candidates*) yang dianggap sosok yang rasional (*rational actor*).

Menurut kerangka berpikir yang dikembangkan Simon (2004), sebagaimana diilustrasikan Gambar 3, untuk mempengaruhi para pemilih, kontestan pemilu menciptakan dan menyampaikan pesan-pesan politik kepada para pemilih. Pesan-pesan politik ini disampaikan melalui kampanye, membentuk aliran informasi, melahirkan *feedback* tertentu yang mempengaruhi kontestan. Dalam skema ini, peran media massa sangat strategis karena kemampuannya membentuk opini publik dengan tema-tema beragam.

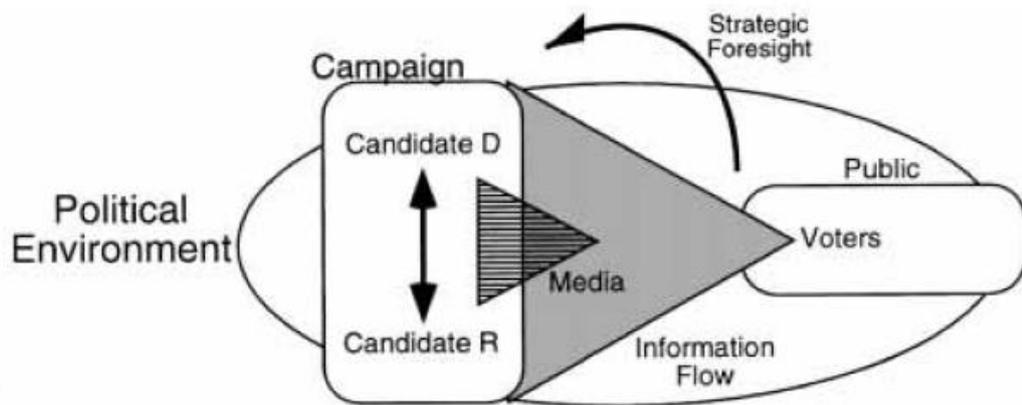
Model Simon (2004) mirip dengan model Lau & Redlawsk (2006: 22). Keduanya menempatkan pentingnya variabel informasi dalam rangka memahami perilaku politik. Bedanya, model Simon (2004) berhubungan dengan produksi informasi. Sedangkan model Lau dan Redlawsk (2006: 22) berkaitan dengan konsumsi informasi. Model Simon (2004) melihat pentingnya peran media massa sebagai agen perantara informasi dan komunikasi antara kandidat dan para pemilih. Di sinilah letak kelemahan model ini. Sebab, kehadiran media massa sangat jarang digunakan dalam konteks pilkades. Jika model ini ingin digunakan dalam rangka

---

<sup>4</sup> Penjelasan lebih rinci dan mendalam tentang pengaruh kondisi ekonomi terhadap pemilihan umum dapat ditemukan dalam Bulau, Heinz., & Lewin-Beck, Michael S., (eds.), 1985. *Economic Conditions and Electoral Outcomes: The United State and Western Europe*. New York, Agathon Press, Inc.

memahami perilaku kandidat dan para pemilih pilkades, maka konsepsi tentang media harus dimodifikasi. Media tidak harus merujuk kepada media massa, tetapi seluruh sarana dan prasarana yang digunakan kandidat dalam rangka menyampaikan pesan politiknya kepada para pemilih. Pada level desa, media itu bisa beragam dan tak bisa dilepaskan dari konteks sosial-budaya yang berlaku di desa tersebut.

Gambar 3  
*Framework perilaku kontestan dalam pemilihan umum*



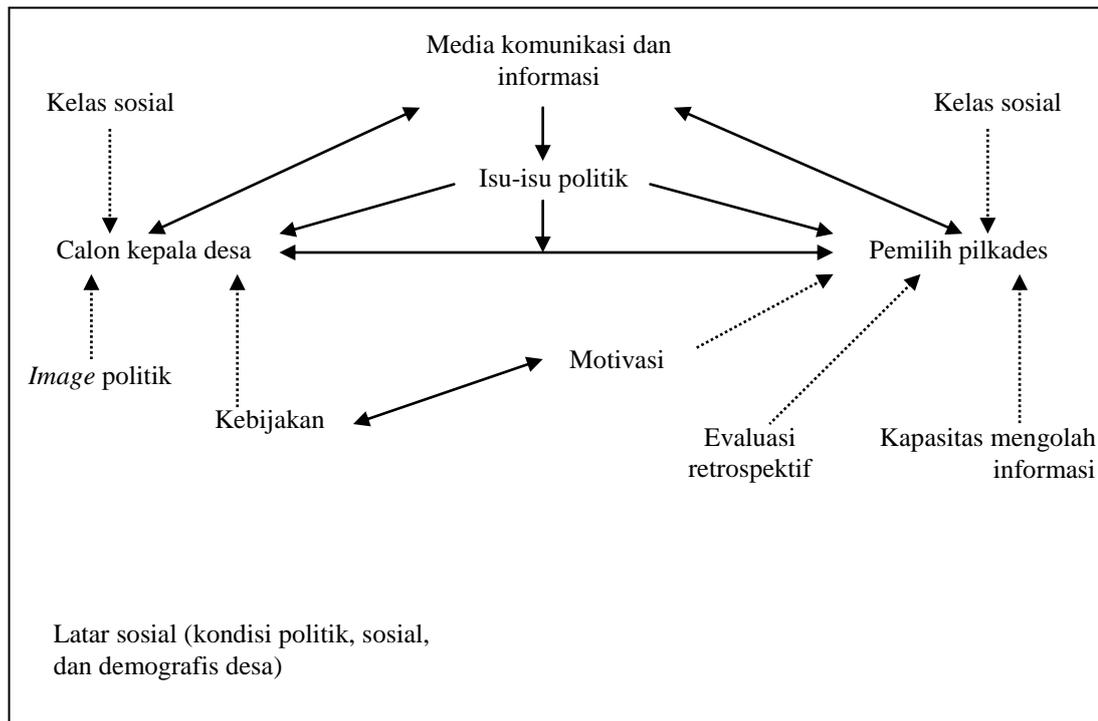
Sumber: Simon (2004: 36)

### **Relasi politik kandidat dan pemilih dalam pilkades:**

#### **Framework alternatif**

Berdasarkan studi literatur atas beberapa teori tentang perilaku pemilih dan perilaku kandidat dalam pemilu di atas, maka bisa dikonstruksi framework alternatif untuk memahami relasi politik kandidat dan pemilih dalam pilkades (*lihat*, Gambar 4). Tentu saja, framework ini jauh dari sempurna dan ia perlu diuji lebih lanjut dengan riset empiris yang melibatkan sampel yang signifikan.

Gambar 4  
*Framework* relasi politik kandidat dan pemilih dalam pilkades



Framework ini bertolak dari asumsi bahwa pilkades tidak terjadi di ruang hampa. Sebaliknya, pilkades sebagai proses politik terjadi dalam latar sosial tertentu. Latar sosial ini adalah kondisi politik, sosial, ekonomi, dan demografis pada level desa. Dari sisi calon kepala desa (*candidate*), ada empat variabel yang mempengaruhi perilaku calon kepala desa yakni: kelas sosial, kebijakan, *image* politik, media komunikasi dan informasi politik, dan isu-isu politik. Sedangkan dari sisi para pemilih pilkades, variabel kelas sosial, motivasi, evaluasi retrospektif, dan kapasitas mengolah informasi, media komunikasi dan informasi, dan isu-isu politik dianggap mempengaruhi perilaku pemilih.

Saya akan menguji framework ini dengan memanfaatkan beberapa data sekunder yang berhasil dikumpulkan dari berita-berita tentang pilkades yang tersedia di internet. Selain itu, hasil wawancara dengan kepala desa<sup>5</sup> di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi akan digunakan sebagai data primer. Tidak semua variabel akan dinarasikan. Dari sisi kandidat, variabel *image* politik yang akan dianalisis. Sedangkan dari sisi para pemilih, variabel evaluasi retrospektif yang akan dianalisis. Dari sisi latar sosial, variabel media komunikasi dan informasi. Framework di atas akan diuji coba untuk memahami relasi politik kandidat dan para pemilih dalam Pilkades Kembangstri 2010.

<sup>5</sup> Kepala desa yang berhasil diwawancarai adalah kepala desa kepala desa Kembangstri, kecamatan Muaro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi

### **Pilkades Kembangsri 2010**

Kembangsri adalah salah satu desa di Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Desa ini berada persis dipinggir Sungai Batanghari. Populasi penduduknya mencapai 2.819 jiwa (laki-laki 1.379 jiwa, perempuan 1.440 jiwa). Mayoritas penduduknya hidup dari sektor perkebunan karet. Mereka juga membudidayakan sawit bekerjasama dengan perusahaan sawit yang ada di sekitar desa mereka.

Pilkades Kembangsri 2010 diikuti tiga calon, termasuk *incumbent*. Calon kedua adalah salah satu diantara ketua rukun tetangga. Calon ketiga adalah seorang anak muda yang pernah berperan sebagai pengurus karang taruna desa. Pilkades dimenangkan anak muda yang bernama Ahmad Malawi, S.Kom. Mengapa Ahmad Malawi, S.Kom bisa mengalahkan *incumbent*?

*Pertama*, image politik positif yang dimiliki Ahmad Malawi, S.Kom. Dalam konteks ini, *image* politik calon kepala desa berkaitan dengan atribut-atribut sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang dimiliki seorang calon kepala desa. Atribut-atribut ini bisa melekat secara personal, baik yang diraih karena prestasi maupun karena warisan. Atribut-atribut ini diantaranya tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi keluarga, pengalaman organisasi pada level desa, sikap dan tingkah laku sosial (akhlak). Atribut-atribut ini berpengaruh kuat dalam membangun karakter citra (*image*) seorang calon kepala desa di mata pemilih. Ahmad Malawi, S.Kom berusia muda (28 tahun), pernah menjadi pengurus karang taruna desa, berpendidikan sarjana (lulusan STMIK AMIKOM Jogjakarta), dan berasal dari keluarga menengah ke atas. Ia memperoleh dukungan penuh dari para pemilih berusia muda (<40 tahun). Atribut-atribut ini memperkuat pencitraan sosok Ahmad Malawi, S.Kom sebagai ‘pemuda yang pantas memimpin desa’.

*Kedua*, *image* negatif yang dimiliki *incumbent*. Ditengah pemukiman penduduk Kembangsri yang didominasi perumahan tradisional, *incumbent* membangun rumah megah bergaya Eropa yang menimbulkan kesan kontras di mata orang yang melihatnya (*lihat*, Gambar 5). Tindakan ini jelas memicu munculnya sikap kurang simpati dari penduduk Kembangsri.

*Ketiga*, kemampuan para pemilih Pilkades Kembangsri 2010 untuk melakukan evaluasi retrospektif terhadap *incumbent*. Hal ini terlihat jelas dalam soal pembangunan rumah kepala desa yang bergaya Eropa. Meskipun aktivitas sehari-hari para pemilih dihabiskan di areal perkebunan, tetapi dialog bebas yang terjadi antar pemilih tatkala mendiskusikan persoalan pembangunan rumah kepala desa berhasil memproduksi nalar evaluatif yang menjalar dari satu pemilih ke pemilih lainnya. Pembangunan rumah kepala desa yang bergaya Eropa ditelaah para pemilih dari banyak sudut pandang, mulai dari ekonomi (dari mana sumber dananya), politik (diduga kepala desa memanfaatkan jabatan politiknya untuk mencari dana pembangunan rumah, kepala desa tidak lagi peduli dengan pembangunan desa), dan sosial-budaya (pembangunan rumah bergaya Eropa di tengah desa Kembangsri

dianggap masyarakat terlalu berlebihan dan menyinggung perasaan kolektif masyarakat yang hidup sederhana).

Gambar 5  
Pemukiman di Desa Kembangsri



Dalam pilkades Kembangsri 2010, keberadaan media massa, terutama koran lokal, hampir tidak ada sama sekali. Sebaliknya, para calon kepala desa lebih banyak menggunakan media komunikasi tradisional, seperti acara Yasinan, pernikahan, dan kegiatan-kegiatan sosial-budaya lainnya pada level desa. Praktis, informasi dari kandidat ke para pemilih mengalir secara langsung tanpa perantara. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan dan peran media massa dalam pilkades Kembangsri 2010 sangat kurang.

Informasi yang mengalir dan menjadi bahan diskusi masyarakat sangat beragam dan selalu terkait dengan kandidat kepala desa. Mulai dari latar belakang keluarganya, sosok kepribadian, dan sepak terjang yang bersangkutan dalam kehidupan masyarakat. Seluruh informasi ini mengalir dari mulut ke mulut. Triangulasi terjadi secara alamiah. Bahan-bahan ini yang kemudian secara sistematis membentuk kerangka pikir para pemilih dan memandu mereka untuk menentukan pilihan akhir politik mereka dalam Pilkades Kembangsri 2010.

Pilkades Kembangsri 2010 dilaksanakan setelah penduduk desa Kembangsri mengikuti pemilu legislatif, pemilu presiden, dan Pilkada Batanghari. Di setiap pemilu, perilaku pemilih bisa berbeda. Di pemilu legislatif dan pemilu presiden, sosok personal calon legislator dan calon presiden dan wakil presiden. Di Pilkada Batanghari 2010, para pemilih sangat dipengaruhi isu putra daerah.<sup>6</sup> Di Pilkades,

---

<sup>6</sup> Pilkada Batanghari 2010 dimenangkan pasangan Fattah-Sinwan. Sinwan adalah mantan kepala desa Kembangsri. Lepas dari jabatan kadesnya, Sinwan menjadi anggota DPRD Kabupaten Batanghari melalui parpol PKPB.

image negatif calon kepala desa, kemampuan evaluasi retrospektif, dan proses komunikasi dan informasi yang terjadi selama pilkades sangat mempengaruhi keputusan akhir para pemilih dan perilaku kandidat. Kasus Pilkades Kembangri 2010 menunjukkan bahwa para pemilih semakin rasional meskipun mayoritas pendidikan terakhir mereka hanya sampai pada pendidikan dasar.

### **Epilog**

Tulisan ini berkesimpulan bahwa (a) model-model teoritik yang telah dikembangkan ilmuwan politik untuk memahami perilaku politik para kandidat dan para pemilih perlu dimodifikasi jika ingin digunakan untuk memahami perilaku kandidat dan perilaku para pemilih dalam pilkades; (b) para pemilih pilkades cenderung rasional meskipun mayoritas tingkat pendidikan mereka hanya sekolah dasar; (c) perlu dilakukan riset dengan sampel yang lebih besar untuk menguji kerangka pikir *nexus candidate-voter* dalam pilkades sebagaimana divisualisasikan Gambar 4.

## Daftar Pustaka

- Adams, James F., Merrill III, Samuel., dan Grofman, Bernard., 2005. *A Unified Theory of Party Competition: A Cross-National Analysis Integrating Spatial and Behavioral Factors*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Bulau, Heinz., & Lewis-Beck, Michael S., (eds.), 1985. *Economic Conditions and Electoral Outcomes: The United States and Western Europe*. New York, Agathon Press, Inc.
- Lau, Richard R., & Redlawsk, David P., 2006. *How Voters Decide: Information Processing during Election Campaign*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Liddle, R. William., & Mujani, Saiful., 2007. *Leadership, Party and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia*, dalam *Comparative Political Studies*, Vol. 40, No. 7, hal. 832-857
- Rodee, *et.al.*, Carlton Clymer., 1983. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Thomassen, Jacques., (eds.), 2005. *The European Voter: A Comparative Study of Modern Democracies*. New York, Oxford University Press.
- Simon, Adam F., 2004. *The Winning Message: Candidates Behavior, Campaign Discourse, and Democracy*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Alm, James., Martinez-Vazquez, Jorge., dan Indrawati, Sri Mulyani., (eds.), 2004. *Reforming Intergovernmental Fiscal Relation and the Rebuilding of Indonesia: The 'Big Bang' Program and its Economic Consequences*. Massachusset, Edward Elgar.
- Erb, Maribeth., Sulistiyanto, Priyambudi., dan Faucher, Carole., (eds.), 2005. *Regionalism in Post-Suharto Indonesia*. London, RoutledgeCurzon.
- Robison, Richard., dan Hadiz, Vedi R., 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London, RoutledgeCurzon.
- Bünthe, Marco., Ufen, Andreas., (eds.) 2009. *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. London, Routledge.
- O'Rourke, Kevin., 2002. *Reformasi: The struggle for power in post-Soeharto Indonesia*. New South Wales, Allen & Unwin.